IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA PADA PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Jhon Simon¹, Kariaman Sinaga², Dina³, Avifa Azila⁴
Universitas Dharmawangsa

Keywords:

Implementasi, Moderasi, Agama, Pembangunan berkelanjutan.

***Correspondence Address:**

kariamansinaga@dharmawangsa.ac.id

Abstrak: Moderasi beragama menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi negara Indonesia yang memiliki keberagaman yang tinggi baik dalam hal agama, suku bangsa, ras, maupun golongan yang ada di masyarakat. Perguruan tinggi merupakan kawah candradimuka bagi mahasiswa dalam mendukung penguatan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki rasa kebersamaan dengan tetap saling menghargai atas segala perbedaan atau kemajemukan. Dalam konteks global, moderasi beragama menjadi sesuai dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan. Artikel merupakan hasil kajian yang dilakukan melalui analisis dan sinkronisasi atas berbagai jurnal dalam implementasi moderasi beragama baik dalam konteks masyarakat luas serta bagi mahasiswa. Publikasi merupakan hasil penelitian yang dilakukan dosen-dosen dan melibatkan mahasiswa dalam memperkuat pemahaman mahasiswa tentang moderasi beragama di Indonesia yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Implementasi moderasi beragama di Indonesia masih belum berjalan secara maksimal sehingga dalam konteks pemerintahan dan dunia usaha masih menimbulkan berbagai persoalan yang didasari atas perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, serta perbedaan lainnya seperti adanya sikap permusuhan atau saling menghina serta diskriminasi yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai moderasi beragama.

PENDAHULUAN

Moderasi beragama memerlukan peningkatan dalam kualitas pelaksanaannya di Indonesia berdasarkan berbagai tantangan saat ini yang dapat menimbulkan perpecahan atau disintegrasi bangsa. Keberagaman dalam agama, suku bangsa, ras, maupun golongan dapat menghambat pencapaian tujuan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 apabila tidak dapat dikelola melalui konsep moderasi beragama yang ditandai oleh penerimaan perbedaan dan

saling menghargai atas berbagai perbedaan agama. Keberhasilan dalam pelaksanaan moderasi beragama akan memberikan dukungan kuat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan Indonesia sehingga mendukung proses menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

Perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang didukung oleh berbagai program dan kurikulum yang memperkuat pelaksanaan moderasi beragama. Sebagai kawah candradimuka bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi manusia Indonesia yang memiliki pemahaman yang kuat untuk dapat menerima keberagaman atau kemajemukan bangsa Indonesia. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan di perguruan tinggi diharapkan akan memberikan kejelasan dalam persiapan mahasiswa yang akan mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan dan kesiapan menuju Indonesia Emas 2045. Keberagaman agama dan suku bangsa juga ditandai oleh perbedaan cara berpikir atau bertindak sehingga keberagaman tidak hanya mencakup unsur fisik tetapi termasuk unsur nonfisik.

Program SDGs (Sustainable Development Goals) yang dijalankan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) secara global menjadi indikator-indikator pencapaian suatu negara dalam berbagai prioritas pembangunan. Indikator SDGs meliputi tujuan: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energy bersih dan terjangkau, dan pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapainya dengan kondisi negara Indonesia yang sangat majemuk, maka sangat diperlukan sikap saling menghargai dan dapat menerima perbedaan agama sebagaimana konsep moderasi beragama. Pembahasan yang dilakukan akan melihat secara lebih jelas tentang keterkaitan moderasi beragama dalam konteks sejarah pelaksanaannya, tantangan moderasi beragama, pembangunan yang berkelanjutan, dan kebijakan yang menyangkut tentang pelaksanaan moderasi beragama di Indonesia.

Implementasi pelaksanaan moderasi beragama di perguruan tinggi meliputi unsur: komunikasi, koordinasi, dan disposisi dari berbagai pihak sehingga pelaksanaannya sangat menuntut partisipasi aktif dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Hal ini sesuai

dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan atau pembangunan yang holistic dengan melibatkan pemangku kepentingan. Perguruan tinggi baik negeri maupun swasta telah memiliki peraturan yang harus dipedomani dalam mendukung moderasi beragama sesuai dengan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi telah memiliki mata kuliah wajib kurikulum yang memiliki keterkaitan dengan moderasi beragama namun memerlukan penguatan sebagaimana tantangan atas fenomena yang berkembang baik secara internal maupun secara eksternal.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada implementasi moderasi yang dijalankan di Indonesia berdasarkan berbagai praktek baik yang telah dilakukan para pemimpin Indonesia dari sejak masa kerajaan hingga kemerdekaan. Termasuk melakukan keterkaitan dengan konsep moderasi beragama di perguruan tinggi terkait dengan perspektif pembangunan berkelanjutan dan kesiapan menuju pencapaian Indonesia Emas Tahun 2045. Penulis berusaha menyampaikan konsep yang dapat menjadi dasar dalam melakukan penguatan dalam pelaksanaan kehidupan moderasi beragama baik terhadap pemerintah, terhadap dunia usaha, dan terhadap masyarakat. Penulisan dilakukan dengan melakukan kesesuaian dengan berbagai jurnal terkait untuk memberikan kejelasan dalam rangka pencapaian Indonesia Emas 2045.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Moderasi Indonesia

Sila pertama Pancasila yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa telah menunjukkan bagian utama yang harus dijalankan di Indonesia yang selalu memerlukan penguatan dalam implementasinya. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan menunjukkan perlunya sikap menerima perbedaan dan saling menghargai perbedaan agama sebagaimana nilai-nilai Pancasila. Kehidupan moderasi beragama telah ditunjukkan pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit yang pada masa pemerintahannya memiliki agama Hindu dan agama Budha yang dapat hidup secara berdampingan.

Dengan demikian, moderasi beragama telah berjalan sejak Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, dan bukti sejarah moderasi beragama di Indonesia juga ditunjukkan adanya perubahan isi Sila Pertama Pancasila dari: Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan Syariat Islam telah dirubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Termasuk berbagai hal lainnya yang telah menggambarkan bahwa moderasi beragama telah menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama. Hal menarik lainnya dalam moderasi agama dapat dilihat dari peran warga negara yang beragama Kristen yaitu Friedrich Silaban sebagai arsitek yang telah berperan dalam mengarsiteki pembangunan Mesjid Istiqlal, Mesjid Al Azhar Jakarta Selatan, Gedung Bank Indonesia dan Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi idiologi negara Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai baik di Indonesia. Presiden Soekarno yang telah mengalami pengasingan di berbagai daerah di Indonesia pada masa kolonialisme turut memberikan andil dalam mengenali karakter asli bangsa Indonesia. Hal ini turut menjadi bagian perjalanan sejarah moderasi beragama di Indonesia yang tercantum pada sila pertama Pancasila. Termasuk didukung oleh bukti sejarah lainnya yang ditulis oleh Mpu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit dalam bukunya Sutasoma dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika.

TANTANGAN MODERASI BERAGAMA

Digitalisasi saat ini telah menjadi keniscayaan dalam kehidupan saat ini yang mempengaruhi baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara saat ini diharapkan dapat melakukan sinergitas atau melakukan pengelolaan dalam digitalisasi dan pemanfaatan media sosial oleh masyarakat sehingga tidak merusak kehidupan beragama. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mendukung pembangunan yang tetap menjaga moderasi beragama melalui pengelolaan media teknologi dan informasi dan dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan keberagaman agama masa depan di Indonesia.(Agindawati, 2019).

Moderasi beragama akan memberikan dukungan terhadap pembangunan yang

berkelanjutan dalam konteks memberikan kesiapan bagi sumber daya manusia terutama bagi para mahasiswa di perguruan tinggi. Hal ini sebagaimana pendidikan karakter yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan di kampus-kampus dalam mendukung kesiapan generasi emas tahun 2045. Dalam perspektif geopolitik juga bahwa pendidikan moderasi beragama di perguruan tinggi diharapkan menghasilkan generasi yang memiliki identitas yang kuat dan mampu menghadapi berbagai persaingan di tingkat global.(Akpan-Obong et al., 2023).Permasalahan yang terjadi saat ini dapat mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa yang dilatarbelakangi oleh adanya konflik suku, ras, agama, dan antar golongan yang membuktikan bahwa wawasan kebangsaan di Indonesia mulai luntur terutama pada era disrupsi ini. Sikap ini tentu sangat disayangkan di tengah keberagaman agama di tanah air Indonesia. Implementasi moderasi beragama sejalan dengan penguatan wawasan kebangsaan dan berbagai kegiatan kemahasiswaan yang dapat mendukung penguatan moderasi beragama.(Belen Keban & Soi Leton, 2023)

Keberhasilan pelaksanaan moderasi beragama tidak dapat terlepas dari pemanfaatan media digital dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan masifnya penggunaan media social di masyarakat, namun tetap memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak malah menimbulkan perpecahan yang dilatarbelakangi perbedaan agama. (Burcori, 2018). Dengan demikian diperlukan adanya literasi digital agar penggunaan media social tidak menimbulkan permusuhan dan unsur kebencian yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Berkelanjutan

Moderasi beragama peran strategi dalam upaya untuk memperkuat demokrasi sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya atau memberikan akses untuk memberikan kesempatan berdialog dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas public. Hal ini akan menjadi penguat atau dasar dalam melakukan pembangunan birokrasi untuk dijalankan kedepannya sebagai pembangunan berkelanjutan. Demokrasi Indonesia saat ini dapat dikatakan masih lemah yang dibuktikan oleh rendahnya partisipasi politik masyarakat baik di level daerah maupun level pemerintah pusat. Kegagalan

kehidupan moderasi beragama merupakan salah satu factor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat yang didalamnya didominasi oleh generasi milenial yang akan melanjutkan pembangunan Indonesia selanjutnya.

Isu Politik identitas merupakan salah satu contoh yang menunjukkan kegagalan dalam kehidupan moderasi beragama yang dapat memunculkan permusuhan dari berbagai penganut agama. Masing-masing agama harus melakukan perbaikan secara internal dan meneguhkan adanya penegakan hukum bagi yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian saling kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah memerlukan kepercayaan yang akan mengantar kesiapan generasi dalam pembangunan kedepan untuk kesiapan Indonesia Emas 2045.

Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas memerlukan dukungan dari sistem pendidikan yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang mendukung pemahaman tentang moderasi beragama diperlukan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi sebagaimana pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang tetap diberikan kepada palajar hingga mahasiswa. Selanjutnya akan diperlukan program-program pendidikan yang memberikan penguatan terhadap penguatan moderasi beragama termasuk berbagai kebijakan yang dapat menyentuh langsung pada penguatan moderasi beragama sebagai dasar pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berdampak pada penganggaran pendidikan. (Arifah, 2018)

Pendidikan moderasi beragama di perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan memerlukan penerapan dalam implementasi perkuliahan, Termasuk berkaitan dengan penugasan-penugasan yang sejalan dengan kurikulum yang diberlakukan saat ini yaitu kurikulum berdampak. Melalui produk-produk pembelajaran diharapkan para mahasiswa lebih memahami tentang moderasi beragama dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. (Darmaji et al., 2021). Termasuk pembangunankarakter yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan semangat kekeluargaan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda. karakter semangat kebangsaan, model rancangan manajemen pembelajaran untuk pembentukan karakter semangat kebangsaan, pelaksanaan

pembelajaran untuk pembentukan karakter semangat kebangsaan, (Alamsyah, 2016).

Implementasi Kebijakan

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan nasional untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat umum. Kebijakan moderasi sebagai pembangunan social yang diperlukan sesuai dengan tantangan globalisasi atau liberalism sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan yang tetap menjaga upaya keadilan bagi masyarakat. (Asiru, 2011). Kebijakan pendidikan menjadi salah satu kebijakan yang diharapkan dapat mendukung moderasi beragama sebagaimana telah disampaikan sebelumnya sebagai suatu prioritas dalam pembangunan berkelanjutan sebagaimana prioritas pembangunan nasional untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, Namun dalam menghasilkan sumber daya yang berkualitas tidak cukup hanya melalui menghasilkan kebijakan tanpa didukung oleh implementasinya, (Bakry, 2010)

Saat ini merupakan era yang sangat menentukan keberhasilan Indonesia menuju Indonesia Emas yang telah menjadi kebijakan pemerintah Indonesia. Ekologi administrasi publik telah menunjukkan berbagai tantangan baik secara eksternal maupun tantangan internal bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan Revolusi Industri 4,0 yang berpengaruh pada implementasi kebijakan public baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hingga ke pemerintahan desa.(Basuki, 2018).

Implementasi moderasi beragama merupakan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang kehidupan moderasi beragama. Berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia telah mengatur tentang kehidupan beragama pada Pasal 29 UUD 1945 yaitu:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuberibadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Indonesia sebagai negara yang memiliki kemajemukan agama, suku bangsa, maupun golongan sangat memerlukan memerlukan moderasi beragama sebagaimana telah diatur di

dalam konstitusi negara Indonesia. Melalui moderasi beragama di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan, keadilan dan hak azasi pada sesuai dengan konstitusi yang akan memberikan keberadaban dan bersifat modernisasi. Berdasarkan ketentuan di dalam konstitusi yang telah memberikan dasar dalam kehidupan moderasi beragama, namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan upaya konkrit dan berkelanjutan dalam mendukung Indonesia Emas 2045.

Implementasi kehidupan moderasi beragama di Indonesia merupakan amanah Undang-Undang dasar 1945 meliputi:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Hak asasi manusia
3. Penyelenggaraan negara
4. Perlindungan warga negara.

Dalam implementasinya, moderasi beragama memerlukan kesesuaian dengan situasi dan kondisi suatu masyarakat atau memiliki kearifan lokal yang memerlukan kesesuaian dengan masing-masing daerah. Nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia merupakan nilai-nilai yang telah terkristalisasi menjadi nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai tertinggi yang menjadi idiologi negara dan kepribadian bangsa Indonesia. Implementasi pada perguruan tinggi sebagaimana telah disampaikan memerlukan penguatan melalui kurikulum dan berbagai penugasan bagi mahasiswa sehingga menghasilkan penguatan kompetensi dalam mempersiapkan menuju Indonesia Emas 2045.

KESIMPULAN

1. Pihak kementerian agama dan lembaga-lembaga terkait perlu melakukan pengawasan atau melakukan fasilitasi atau mitigasi untuk dapat melakukan kebijakan yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang dapat merusak kehidupan moderasi beragama di Indonesia.
2. Diperlukan implementasi dari pihak pemerintah, pihak dunia usaha, dan pihak organisasi masyarakat untuk penegakan dalam pelaksanaan moderasi beragama yang berdampak pada kesiapan masyarakat dan kesiapan dalam menghasilkan Indonesia emas 2045.

3. Implementasi konsep moderasi beragama memerlukan upaya konkrit baik dari pihak pemerintah, pihak dunia usaha, dan pihak organisasi masyarakat serta sanksi yang tegas terhadap bentuk pelanggaran yang menghambat lahirnya moderasi beragama.
4. Kebijakan publik diperlukan dalam mendukung keberhasilan moderasi beragama baik kebijakan penganggaran pendidikan maupun kebijakan lainnya untuk mendukung kehidupan moderasi beragama yang akan menjadi salah satu faktor dalam mendukung ketercapaian menuju Indonesia Emas 2045.
5. Perguruan memerlukan penguatan dalam pelaksanaan moderasi beragama melalui sinkronisasi kurikulum dan bentuk – bentuk penugasan yang memperkuat kompetensi mahasiswa dalam mendukung generasi yang dapat menerima perbedaan agama dan dapat menghargai berbagai keberagaman.

REFERENSI

- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. *Jurnal Inspirasi*, 10(1). <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.68>.
- Akpan-Obong, P. I., Trinh, M. P., Ayo, C. K., & Oni, A. (2023). E-Governance as good governance? evidence from 15 West African countries. *Information Technology for Development*, 29(2–3). <https://doi.org/10.1080/02681102.2022.2123770>.
- Alamsyah, K. (2016). Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. *Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi*.
- Arifah, U. (2018). KEBIJAKAN PUBLIK DALAM ANGGARAN PENDIDIKAN. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v2i1.37>
- Asiru, R. (2011). Kebijakan Publik Dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.19>
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(1).
- Basuki, J. (2018). Ekologi Administrasi Publik Di Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Perspektif Kebijakan Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2).
- Belen Keban, Y., & Soi Leton, S. (2023). PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA DALAM PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA ERA DISRUPSI DI SD INPRES EKASAPTA LARANTUKA. *NALAR: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2(1). <https://doi.org/10.56444/nalar.v2i1.372>

- Burcori, A. (2018). Pentingnya Literasi Digital Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Sosialisasi Pembangunan Melalui Media Sosial. *OMNICOM Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1).
- Darmaji, D., Ulfatin, N., & Mustiningsih, M. (2021). PERFORMANSI KARAKTER SEMANGAT KEBANGSAAN DAN MANAJEMEN PEMBELAJARANNYA PADA SEKOLAH DASAR UMUM DAN KEAGAMAAN. *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 13(1). <https://doi.org/10.17509/eh.v13i1.29541>